

**LAPORAN BULANAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
BULAN MEI TAHUN 2023**



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Jl. Raya Sentani - Waena

Telp. 0967-574160 | Fax. 0967-571216

Website: ptun-jayapura.go.id

Email: ptun.jayapura@gmail.com

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	
Daftar Isi	1
Daftar Tabel	3
Bab I. PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Sejarah Singkat	5
C. Maksud Dan Tujuan	8
D. Sistematika Penyusunan Laporan	8
BAB II. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	9
A. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara.	9
B. Tugas Pokok.	9
C. Fungsi.	9
D. Manajemen Kepaniteraan.	10
Struktur Organisasi.	10
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepaniteraan.	11
E. Manajemen Kesekretariatan	17
1. Struktur Organisasi.	17
2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesekretariatan.	18
BAB. III Kesimpulan Dan Rekomendasi.	28
A. Kesimpulan.	28
B. Rekomendasi.	28
LAMPIRAN	29
Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.01.	30
Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.05.	33
Lampiran 3 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.01.	35
Lampiran 4 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.05.	38
Lampiran 5 : Laporan Perkara (LI-T1,LI-T2,LI-T3,LI-T4, LI- T5, LI-T6).	41

DAFTAR TABEL		Hal
Tabel 1.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua.	5
Tabel 2.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat.	6
Tabel 3.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Selatan.	6
Tabel 4.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Tengah.	6
Tabel 5.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Pegunungan.	7
Tabel 6.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat Daya.	7
Tabel 7.	Pergantian Pucuk Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	7
Tabel 8.	Laporan Keadaan Perkara Bulan Mei Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	12
Tabel 9.	Laporan Jenis Perkara Bulan Mei Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	12
Tabel 10.	Keadaan Keuangan Perkara Bulan Mei Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	13
Tabel 11.	Biaya Proses/ATK/Pemberkasan Bulan Mei Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	13
Tabel 12.	Biaya Eksekusi s.d Bulan Mei Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	14
Tabel 13.	Buku Register Meja Informasi Bulan Mei Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	15
Tabel 14.	Buku Register Pelayanan Posbakum bulan Mei Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	16
Tabel 15.	Pagu Anggaran DIPA 005.01 sampai Bulan Mei Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	19
Tabel 16.	Pagu Anggaran DIPA 005.01 sampai Bulan Mei Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	19

Tabel 17.	Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan Mei 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	20
Tabel 18.	Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan Mei 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	20
Tabel 19.	Realisasi Penerimaan PNBP Bulan Mei Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	20
Tabel 20.	Data Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	21
Tabel 21.	Data Peruntukan Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	21
Tabel 22.	Data Kendaraan Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	21
Tabel 23.	Keadaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	22
Tabel 24.	Data Surat Masuk dan Surat Keluar Periode Mei Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	26
Tabel 25.	Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	27
Tabel 26.	Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	28
Tabel 27.	Jabatan Fungsional yang Diperbantukan pada Jabatan Administrasi Lainnya	29
Tabel 28.	Tenaga Honorer yang Diperbantukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	29
Tabel 29.	Data Promosi dan Mutasi Bulan Mei pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	30
Tabel 30.	Data Pensiun Bulan Mei pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	30
Tabel 31.	Diklat/Bimtek SDM Teknis dan Non Teknis Hakim dan Pegawai Bulan Mei Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	30
Tabel 32.	Rekapitulasi kelengkapan Database Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Bulanan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ini adalah penyampaian hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dan kegiatan pelaksanaan tugas selama satu bulan yaitu bulan Mei secara umum, kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Pengadilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu Institusi Negara / Kepemimpinan sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada dipercayakan ke publik.

Dalam melaksanakan tupoksi dan kebijakan di bidang pelayanan administrasi Peradilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mengacu kepada Visi dan Misi Mahkamah Agung RI yaitu:

Visi:

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

Misi:

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas aparatur Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Berdasarkan visi dan misi diatas, dikembangkanlah nilai-nilai utama Mahkamah Agung. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Terdapat 8 nilai utama, antara lain:

1. Kemandirian
2. Integritas

3. Kejujuran
4. Akuntabilitas
5. Responsibilitas
6. Keterbukaan
7. Ketidakberpihakan
8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum

Oleh karena itu 8 nilai utama Mahkamah Agung harus tertancap kuat dan diimplementasikan dalam pikiran, ucapan, serta tindakan setiap individu dalam kehidupan berorganisasi dengan pola pikir yang melayani masyarakat, profesionalitas kinerja yang tinggi, dan berorientasi pada hasil.

B. Sejarah Singkat

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1993. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berkedudukan di Jln. Raya Sentani – Waena Jayapura.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mempunyai tugas pokok memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat final dan mengikat .

Sedangkan Wilayah Hukum operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Adalah Wilayah Hukum Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W4-TUN4/2538/HK.00.08/XII/2019 Tentang Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yaitu:

I. Provinsi Papua

Tabel 1. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kota Jayapura	Jayapura
2.	Kabupaten Jayapura	Sentani
3.	Kabupaten Keerom	Waris
4.	Kabupaten Sarmi	Sarmi
5.	Kabupaten Waropen	Botawa
6.	Kabupaten Supiori	Sorendiweri
7.	Kabupaten Mamberamo jaya	Burmeso
8.	Kabupaten Kepulauan Yapen	Serui

II. Provinsi Papua barat

Tabel 2. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Fak-fak	Fak-fak
2.	Kabupaten Kaimana	Kaimana
3.	Kabupaten Manokwari	Manokwari
4.	Kabupaten Manokwari Selatan	Ransiki
5.	Kabupaten pegunungan Arfak	Anggi
6.	Kabupaten Teluk Bintuni	Bintuni
7.	Kabupaten Teluk Wondama	Rasiei

III. Provinsi Papua Selatan

Tabel 3. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Selatan

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Merauke	Merauke
2.	Kabupaten Boven Digoel	Tanah Merah
3.	Kabupaten Mappi	Kepi
4.	Kabupaten Asmat	Agats

IV. Provinsi Papua Tengah

Tabel 4. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Tengah

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Nabire	Nabire
2.	Kabupaten Paniai	Enarotali
3.	Kabupaten Mimika	Timika
4.	Kabupaten Dogiyai	Kigamani
5.	Kabupaten Intan Jaya	Sugapa
6.	Kabupaten Deiyai	Tigi
7.	Kabupaten Puncak	Ilaga
8.	Kabupaten Puncak Jaya	Mulia

V. Provinsi Papua Pegunungan

Tabel 5. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Pegunungan

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Jayawijaya	Wamena
2.	Kabupaten Pegunungan Bintang	Oksibil
3.	Kabupaten Yahukimo	Sumohai
4.	Kabupaten Tolikara	Karubaga
5.	Kabupaten Mamberamo Tengah	Kobakma
6.	Kabupaten Yalimo	Elekmi
7.	Kabupaten Lanny Jaya	Tiom
8.	Kabupaten Nduga	Kenyam

VI. Provinsi Papua Barat Daya

Tabel 6. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat Daya

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kota Sorong	Sorong
2.	Kabupaten Sorong	Aimas
3.	Kabupaten Sorong Selatan	Teminabuan
4.	Kabupaten Maybrat	Kamurkek
5.	Kabupaten Tambrauw	Fef
6.	Kabupaten Raja Ampat	Waisai

Sejak beroperasi pada tahun 1993 sampai dengan saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mengalami pergantian pucuk pimpinan sebanyak 14 kali yaitu sebagai berikut:

Tabel 7. Pergantian Pucuk Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA	MASA JABATAN
1	LAY MINGGUS, SH	Periode 1994 – 1997
2	SAMUEL TULAK, SH	Periode 1997 – 1999
3	DRS YANSON P. SITORUS, SH., MH	Periode 1999 – 2002
4	ANDI LUKMAN, SH	Periode 2002 – 2004
5	SANTER SITORUS, SH., M.HUM	Periode 2004 – 2006
6	ULUAN M. HUTAGALUNG, SH	Periode 2006 – 2007
7	AGUS WAHYU RAHARDI, SH., MH	Periode 2007 – 2009

8	ASMIN SIMANJORANG, SH	Periode 2009 – 2011
9	JAMRES SARAAN, SH	Periode 2011 – 2013
10	KASIM, SH.,MH	Periode 2013 – 2015
11	SINGGIH WAHYUDI, SH	Periode 2015 – 2017
12	IMANUEL MOUW, SH	Periode 2018 – 2020
13	MASDIN, S.H., M.H	Periode 2020 – 2023
14	JUSAK SINDAR, S.H	Periode 2023 – sekarang

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya laporan bulanan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja dan indikator capaian tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pengadilan Tingkat Banding yang membawahi wilayah hukumnya selama satu bulan periode pelaporan.

Tujuan dibuatnya laporan bulanan ini untuk memberikan dan menyediakan data dukung yang dibutuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai data sumber penyusunan laporan bulanan, semester dan tahunan serta sebagai bahan informasi dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Peradilan Tata Usaha Negara Jayapura yang berada di wilayah hukumnya. Dan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura laporan bulanan ini bermanfaat sebagai laporan hasil capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat menjadi bahan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.

D. Sistematika Penyusunan Laporan

Mekanisme penyusunan laporan ini memanfaatkan aplikasi Sistem SIPACE yang dikembangkan oleh Pranata Komputer Tingkat Pertama.

Adapun sistematika penyajian laporan ini dapat diuraikan antara lain :

Bab I. Pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan dan lingkup pekerjaan dan manfaat dokumen laporan bulanan dengan keterkaitannya terhadap laporan

Bab II. Menguraikan pelaksanaan kedudukan, tugas pokok dan fungsi pada bulan berkenaan.

Bab III. Penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

B. Tugas Pokok

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara Tata Usaha Negara di tingkat pertama, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

C. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (kepegawaian, Perencanaan IT dan pelaporan, umum dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Tata Usaha Negara pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
5. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum.

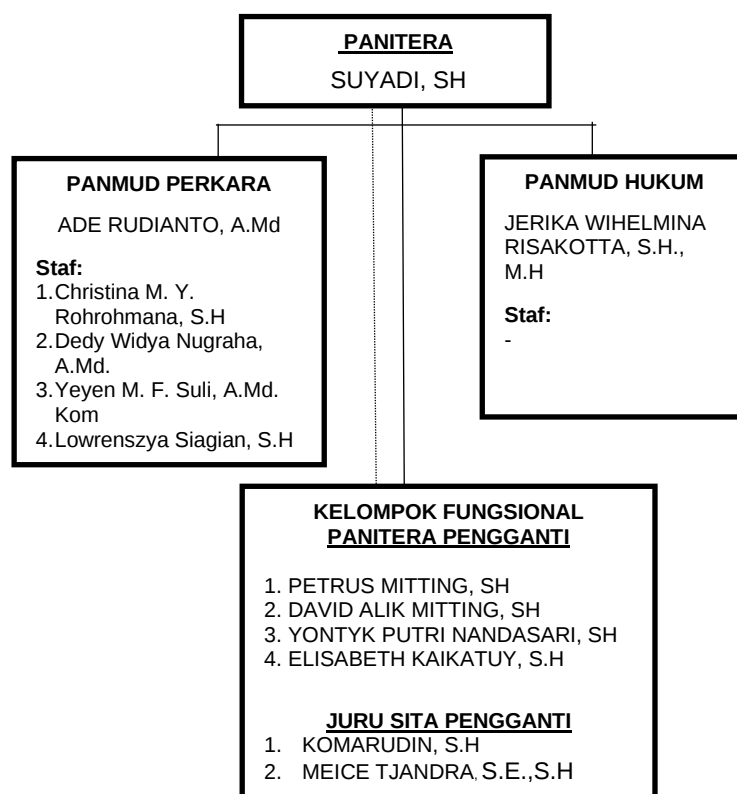
D. Manajemen Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dipimpin oleh Panitera, mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
4. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
5. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

1. Struktur Organisasi Kepaniteraan

Struktur organisasi kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepaniteraan

Pada bab VI tentang Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara, Bagian Ketiga Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Susunan organisasi kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A terdiri atas:

a. Kepaniteraan Muda Perkara; Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Panitera Muda Perkara menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan berkas perkara gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 2) pelaksanaan registrasi perkara gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 3) pelaksanaan penelitian administrasi gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 4) pelaksanaan penyerahan berkas perkara gugatan/sengketa tata usaha negara kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Panitera untuk ditetapkan apakah perkara tersebut dismissal atau tidak, jika tidak akan ditetapkan atau ditunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa.
- 5) pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 6) pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak;
- 7) pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 8) pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung;
- 9) pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 10) pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 11) pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 12) pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- 13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan Kepaniteraan Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada bulan Mei 2023 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Laporan Keadaan Perkara dan Jenis Perkara

1.1. Laporan Keadaan Perkara

Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura periode bulan Mei Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 8. Laporan Keadaan Perkara Bulan Mei Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	PERKARA	SISA BLN LALU	MASUK BLN INI	PUTUS BLN INI	SISA SD BLN INI	KETERANGAN			
						CABUT	GUGUR	PLW	DISMISAL
1	Gugatan	15	5	11	9	-	-	-	-
2	Banding	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kasasi	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PK	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Eksekusi	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Laporan Jenis Perkara

Laporan Jenis Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura periode bulan Mei Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 9. Laporan Jenis Perkara Bulan Mei Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	JENIS PERKARA	SISA BLN LALU	BULAN INI	S/D BLN INI
1	Pertanahan	6	1	7
2	Kepegawaian	6	4	10
3	Perijinan	-	-	-
4	Lingkungan Hidup	1	-	1
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-
6	Badan Hukum/Parpol	-	-	-
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-
8	Kepala Daerah	-	-	-
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-
10	Penggantian Antar Waktu	1	-	1
11	Ketenaga Kerjaan	-	-	-
12	KIP	-	-	-
13	Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Umum	-	-	-
14	Permohonan Fiktif Positif	-	-	-
15	Penyalahgunaan wewenang	-	-	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	-	-	-
17	Tindakan Faktual	-	-	-
18	Merek	-	-	-
19	Lain-lain	1	-	1
Total		15	5	20

1.3. Keadaan Keuangan Perkara Bulan Mei 2023

Tabel 10. Keadaan Keuangan Perkara Bulan Mei Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	40.958.500	-	-	40.958.500
2	Penerimaan	-	10.778.000	-	10.778.000
3	Alat Tulis Kantor	-	-	750.000	750.000
4	Biaya Panggilan	-	-	553.000	553.000
5	Biaya Pemberitahuan	-	-	347.000	347.000
6	Biaya Pemeriksaan setempat	-	-	2.250.000	2.250.000
7	Biaya Pemberkasan dan Pengiriman Berkas	-	-	1.403.000	1.403.000
8	Biaya Pengiriman Perkara	-	-	500.000	500.000
9	Materai	-	-	120.000	120.000
10	PNBP:	-	-	-	-
	a. Biaya Pendaftaran	-	-	550.000	550.000
	b. Redaksi	-	-	120.000	120.000
	c. PNBP Lain-lain	-	-	705.000	705.000
11	Pengembalian Sisa Panjar kepada Pihak	-	-	3.067.000	3.067.000
12	Pengembalian Sisa Panjar kepada Negara	-	-	-	-
	Jumlah	40.958.500	10.778.000	10.365.000	41.371.500

1.4. Biaya proses/ATK/Pemberkasan s.d Bulan Mei 2023

Tabel 11. Biaya Proses/ATK/Pemberkasan Bulan Mei Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	11.921.500	-	-	11.921.500
2	Penerimaan	-	750.000	-	750.000
3	Pengeluaran (untuk seluruh pembelian ATK secara riil, tidak perlu dirinci satu persatu)	-	-	215.000	215.000
	Jumlah	11.921.500	750.000	215.000	12.456.500

1.5. Biaya Eksekusi s.d Bulan Mei 2023

Tabel 12. Biaya Eksekusi s.d Bulan Mei Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	1.682.000	-	-	1.682.000
2	Penerimaan	-	500.000	-	500.000
3	Materai	-	-	-	-
4	Biaya Surat Panggilan	-	-	-	-
5	Biaya Surat Pemberitahuan	-	-	-	-
6	Hak-hak Kepaniteraan	-	-	25.000	-
7	Surat Pemberitahuan kepada Presiden/DPR	-	-	-	-
8	Pengumuman Media Cetak	-	-	-	-
9	Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	11.921.500	750.000	215.000	12.456.500

1.6. Laporan Pelaksanaan SIPP

Secara umum penanggung jawab pelaksanaan SIPP adalah seluruh stake holder yang berkepentingan dalam alur/bisnis proses perkara. Aplikasi SIPP yang telah berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah SIPP Versi 5.0.0. Rasio penanganan perkara sampai dengan akhir bulan Mei Tahun 2023 adalah 72,22%. Kendala teknis pengisian aplikasi diantaranya adalah gangguan pada jaringan internet sedangkan non teknis terkait dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana sudah berjalan dengan baik.

b. Kepaniteraan Muda Hukum

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada bulan Mei 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan

Pengelolaan dan pelayanan meja informasi mengacu pada SK KMA No.144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang telah diperbarui dengan SK KMA No. 1-144KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memiliki sarana meja informasi dan meja pengaduan. Petugas meja informasi telah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W4-TUN4/110/HM.02.3/I/2023 tentang Pengelola Meja Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Dan petugas meja pengaduan telah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W4-TUN4/109/HM.02.3/I/2023 tentang Pelayanan Pengaduan. Sarana lainnya telah tersedianya buku register meja informasi dan pengaduan.

Tabel 13. Buku Register Meja Informasi Bulan Mei Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	PEMOHON	TGL DITERIMA	OBJEK PEMOHON	TINDAK LANJUT
1	Enggeriani	02/05/2023	Salinan putusan perkara nomor 33/G/2022/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan
2	Ong Lian Tjen	09/05/2023	Salinan putusan perkara nomor 25/G/2022/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan
3	Cyfranus Y. Mambay	11/05/2023	Salinan putusan perkara nomor 33/G/2022/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan
4	Erwin Hutagaul	12/05/2023	Salinan putusan perkara nomor 25/G/2022/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan
5	Yan F. Marani	23/05/2023	Salinan putusan perkara nomor 4/G/2023/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan
6	Dr. Semy Latunussa, S.H.,M.H	23/05/2023	Salinan putusan perkara	Mendapat Salinan Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menyiapkan sarana meja pengaduan dan petugas meja pengaduan telah ditunjuk melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Bulan ini tidak terdapat Pengaduan yang terdaftar pada buku register Bulan Mei 2023.

2. Pelayanan dan Kegiatan Posbakum

Tabel 14. Buku Register Pelayanan Posbakum bulan Mei Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO.	PEMOHON	JENIS JASA	JUMLAH JAM LAYANAN	KET
1	Martha Wanggai	Konsultasi masalah pengurusan gaji pension dari Alm. Suami yang mempunyai 2 orang di luar nikah dan Taspen meminta surat pengesahan anak dari Pengadilan	1 Jam	-
2	Hosga Genogga	Konsultasi anggota DPKP Papua terkait permasalahan pembatalan 7 kampung di Kab. Tolikara, beliau hanya ingin mengklarifikasi terkait putusan Pengadilan	1 Jam	-
3	Archilaus A. Fonataba	Konsultasi Hukum terkait ingin menggugat Komisi Indonesia	1 Jam	-
4	Muhammad Nasir	Konsultasi hukum terkait Surat Keterangan Cerai	1 Jam	-
5	Jayadin Arif	Konsultasi Hukum terkait pencabutan sertifikat	1 Jam	-
6	Femmy Masihor	Konsultasi masalah tanah di BTN Grand Doyo Baru dari Tahun 2008 sampai sekarang tidak ada penyelesaian	1 Jam	-
7	Stelia N. Ulus	Konsultasi Hukum masalah asusila yang dilakukan oleh anaknya dan minta pendampingan di Polres	1 Jam	-

3. Tata Kelola Arsip Perkara

Pengelolaan arsip perkara dibedakan kedalam arsip perkara yang masih aktif (perkara yang belum putus atau masih dalam proses upaya hukum) berada pada

kepaniteraan perkara, sedangkan arsip perkara yang sudah putus dan berkekuatan hukum tetap, dilimpahkan ke Kepaniteraan Hukum kepada Panitera Muda Hukum.

Arsip perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, dipindahkan dari ruang Kepaniteraan Hukum ke tempat ruang penyimpanan arsip perkara dengan luas penyimpanan yang tergolong kecil dan kurang memadai untuk menyimpan arsip perkara dalam jumlah banyak.

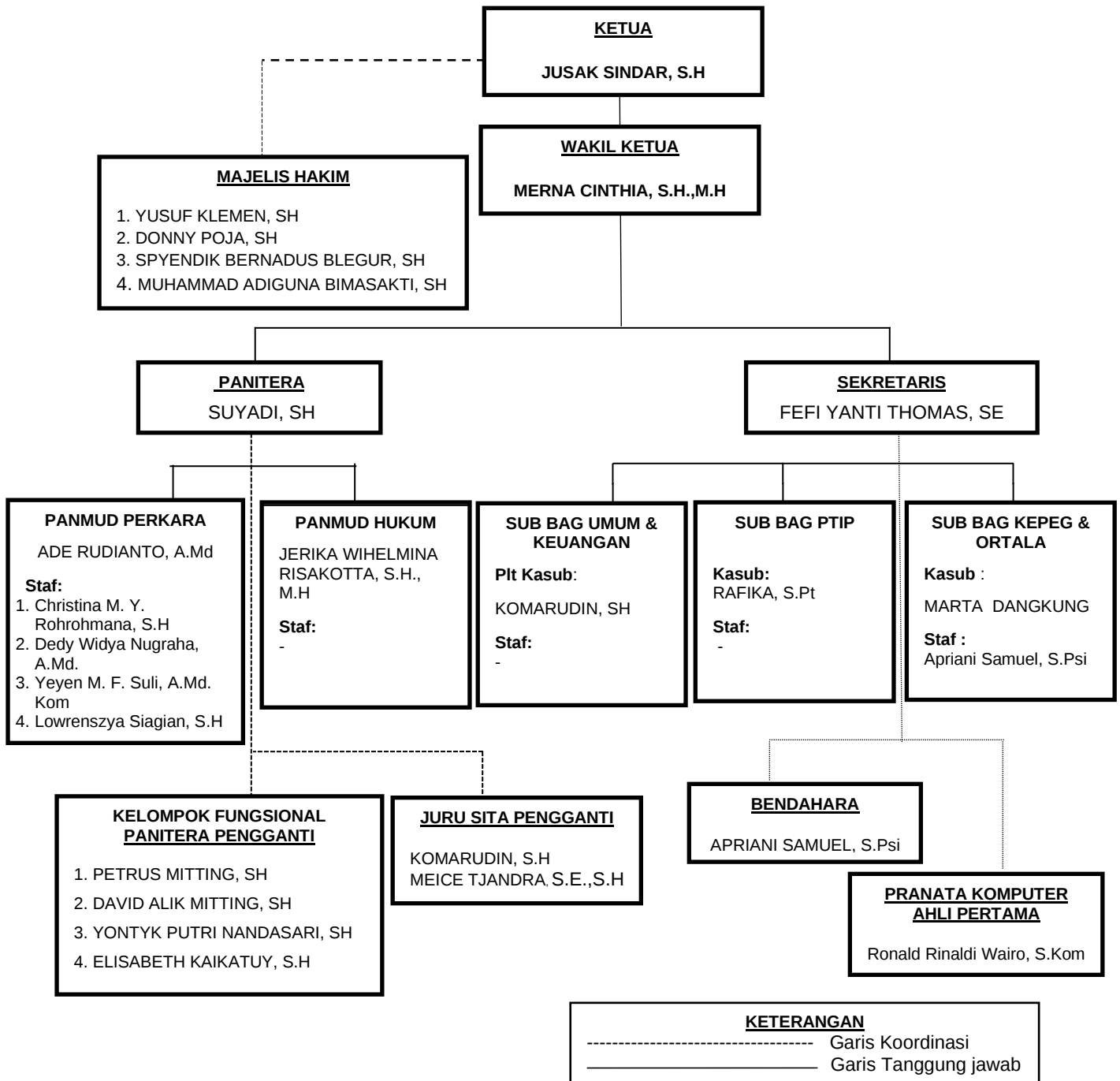
Ruang arsip perkara telah menempati ruang khusus pengarsipan yang terletak di ruangan arsip perkara. Telah dilakukan pelabelan nomor perkara pada berkas perkara.

E. Manajemen Kesekretariatan

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan telah mengatur kedudukan, tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada peradilan dibawahnya. Susunan struktur organisasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (Sesuai Perma No. 7 Tahun 2015)



2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesekretariatan

Sebagaimana tersebut pada Bab XI Bagian Ketiga Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tugas pokok dan fungsi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A dipimpin

oleh Sekretaris. Berdasarkan hal tersebut di atas, Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

1) Sub Bagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. Untuk pelaksanaan kegiatan pada bulan Mei 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Anggaran

- ❖ Pagu Anggaran DIPA 01 PTUN Jayapura Tahun 2023 sampai dengan bulan Mei 2023.

Tabel 15. Pagu Anggaran DIPA 005.01 sampai Bulan Mei Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Jenis Belanja	Pagu (Rp)
Belanja Pegawai	4.220.241.000
Belanja Barang	1.915.511.000
Belanja Modal	38.433.000
Total	6.174.185.000

- ❖ Pagu Anggaran DIPA 05 PTUN Jayapura Tahun 2023 sampai dengan bulan Mei 2023

Tabel 16. Pagu Anggaran DIPA 005.05 sampai Bulan Mei Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Klasifikasi RO	Pagu (Rp)
Pelaksanaan Pengamanan Sidang	12.000.000
Pos Bantuan Hukum	32.900.000
Prodeo	1.400.000
Total	46.300.000

b. Realisasi Anggaran sampai dengan bulan Mei 2023

Laporan Realisasi Anggaran DIPA 005.01 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdasarkan pos belanja:

Tabel 17. Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan Mei Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	BELANJA	DIPA (005.01)	REALISASI		SISA
			BULAN INI	S/D BLN INI	
1	Pegawai	4.220.241.000	273.692.759	1.527.078.534	2.693.162.466
2	Barang	1.912.215.000	124.321.991	614.871.071	1.297.343.929
3	Barang Non Operasional	3.296.000	0	1.980.000	1.316.000
4	Modal	38.433.000	0	0	38.433.000

Laporan Realisasi Anggaran DIPA 005.05 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdasarkan pos belanja:

Tabel 18. Realisasi Anggaran DIPA 005.05 Bulan Mei Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	BELANJA	DIPA (005.05)	REALISASI		SISA
			BULAN INI	S/D BLN INI	
1	Pegawai	-	-	-	-
2	Barang	46.300.000	4.000.000	15.534.200	30.765.800
3	Modal	-	-	-	-

Rincian laporan realisasi anggaran manual dapat dilihat pada tabel lampiran.

1) Laporan PNBPN

Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode bulan Mei Tahun 2023 secara umum sebagai berikut:

Tabel 19. Realisasi Penerimaan PNBPN Bulan Mei Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO.	AKUN	JENIS PENDAPATAN	BLN INI	SD BLN INI
1	425131	Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	2.443.704	12.120.428
2	425232	Uang Meja (Leges)	120.000	530.000
3	425233	Ongkos Perkara	240.000	1.330.000
4	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	835.000	8.920.000
		Total	1.195.000	10.780.000

Laporan realisasi PNBPN secara rinci dapat dilihat pada tabel lampiran.

c. Keadaan Sarana dan Prasarana

Gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdiri diatas tanah seluas 3500 m2 dengan rincian luasan gedung 1444 m2, halaman gedung 2780 m2 dan pagar 222 m2. Rumah dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

Tabel 20. Data Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	TYPE	TAHUN	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN
1	B	1992	700 m2	200 m2
2	B	1992	700 m2	150 m2
3	C	1992	1100 m2	120 m2
4	C	1992	1100 m2	120 m2
5	C	1992	1100 m2	120 m2
6	C	1992	1100 m2	120 m2

Peruntukan rumah dinas berdasarkan +Surat Keputusan Penghunian Rumah Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Data Peruntukan Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	TYPE	LUAS TANAH	NO.SK	PENGGUNA	JABATAN
1	B	700 M2	W8-TUN3/70/PL.01/II/2023	Jusak Sindar, S.H	Ketua
2	B	700 M2	W8-TUN3/839/PL.01/VIII/2023	Merna Cinthia, S.H., M.H	Wakil ketua
3	C	1100 M2	W8-TUN3/756/PL.01/VII/2023	Muh. Adiguna Bimasakti, S.H	Hakim
4	C	1100 M2	W8-TUN3/72/PL.01/II/2023	Spyendik Bernadus Blegur, S.H	Hakim
5	C	1100 M2	W8-TUN3/697/PL.01/VI/2023	Donny Poja, S.H	Hakim

Data kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Kendaraan dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas.

Tabel 22. Data Kendaraan Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA ASET	TAHUN	NO. PLAT	KONDISI	N0.SK	PENGGUNA	JABATAN	KET
1	Toyota Innova	2012	PA 60	Baik	W8-TUN3/387/PL.06/II/2023	JUSAK SINDAR, S.H	KETUA	
2	Toyota Vios	2006	PA 1988 DZ	Baik	W8-TUN3/504/PL.06/II/2023	MERNA CINTHIA, S.H., M.H	WAKIL KETUA	
3	Toyota Innova	2011	PA 1810 DZ	Baik	W8-TUN3/82/PL.06/II/2023	FEFI YANTI THOMAS, SE	SEKRETARIS	

4	Toyota Kijang KF 71 SPR	2003	PA 1689 DZ	Baik	W8-TUN3/ 88/PL.06/II/2023	SUYADI, SH	PANITERA	
5	Toyota Kijang Super	1993	PA 1697 DZ	Baik	W8-TUN3/ 86/PL.06/II/2023	DAVID.ALIK MITTING, SH	PANITERA PENGGANTI	
6	Honda	2011	PA 4289 DZ	Baik	W8-TUN3/ 905/PL.06/VI/2023	MEICE TJANDRA, S.H.,M.H	JURU SITA PENGGANTI	
7	Honda	2009	DS 6219 AF	-	-	-	-	TGR
8	Honda	2011	PA 4396 DZ	Baik	W8-TUN3/ 1140/PL.06/XI/202 3	DAVID.ALIK MITTING, SH	PANITERA PENGGANTI	
9	Honda	2008	PA 4517 DZ	Baik	W8-TUN3/ 100/PL.06/II/2023	DEDY W. NUGRAHA, A.Md	PENGADMINISTRASI REGISTRASI PERKARA	PENGELOLA KEUANGAN
10	Honda	2008	DS 4301 DZ	Baik	W8-TUN3/ 92/PL.06/II/2023	MARTA DANGKUNG	KASUB.KEPG & ORTALA	
11	Honda	2008	PA 4743 DZ	Baik	W8-TUN3/ 98/PL.06/II/2023	RONALD RINALDI WAIRO, S.Kom	PRANATA KOMPUTER	
12	Honda	2005	PA 4732 DZ	Baik	W8-TUN3/ 90/PL.06/II/2023	PETRUS MITTING, SH	PANITERA PENGGANTI	
13	Honda	2009	PA 4658 DZ	Baik	W8-TUN3/ 108/PL.06/II/2023	KOMARUDIN, SH	JURU SITA PENGGANTI	PLT. KASUB UMUM DAN KEUANGAN
14	Honda	2009	PA 4372 DZ	Baik	W8-TUN3/ 104/PL.06/II/2023	ELIZABETH KAIKATUY, SH	PANITERA PENGGANTI	
15	Honda	2005	PA 4290 DZ	Baik	W8-TUN3/ 110/PL.06/II/2023	CHRISTINA.M.Y. ROHROHMANA, S.H	ANALIS PERKARA PERADILAN	BENDAHARA PENERIMAAN
16	Honda	2007	PA 4518 DZ	Baik	W8-TUN3/ 94/PL.06/II/2023	ADE RUDIANTO. A.Md	PANITERA MUDA PERKARA	
17	Honda	2011	PA 4132 DZ	Baik	W8-TUN3/ 102/PL.06/II/2023	YONTYK PUTRI NANDASARI, S.H	PANITERA PENGGANTI	PEJABAT PENGADAAN
18	Honda	2007	PA 4519 DZ	Baik	W8-TUN3/ 96/PL.06/II/2023	JERIKA W. RISAKOTTA, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	
19	Honda	2007	PA 3473 DZ	Baik	W8-TUN3/ 106/PL.06/II/2023	RAFIKA. S.Pt	KASUB PTIP	

Data Ruangan dan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

Tabel 23. Keadaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA BARANG MILIK NEGARA	STATUS			Keterangan
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1	-	-	
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	-	-	
3	Sedan	1	-	-	
4	Mini Bus	4	-	-	
5	Sepeda Motor	13	-	2	
6	Cermin	2	-	3	
7	Rak-rak Penyimpan	14	1	3	
8	Lemari Besi	3	-	7	
9	Lemari Kayu	30	6	8	
10	Brankas	2	-	-	
11	CCTV	1	-	-	
12	Papan Visual/Papan Nama	6	-	11	
13	White Board	1	-	1	
14	LCD Projektor	1	-	-	
15	Meja Kerja Kayu	56	14	50	
16	Kursi Besi	29	4	44	
17	Kursi Kayu	19	31	41	
18	Sice	5	3	12	
19	Bangku Panjang Kayu	20	7	7	
20	Sketsel	2	-	-	
21	Kursi Fiber Glass	23	33	14	
22	AC Split	21	-	15	
23	Mixer	2	-	1	
24	Televisi	3	-	6	
25	Amplifire	2	1	-	
26	Loudspeaker	6	-	8	
27	Tiang Bendera	4	1	1	
28	Kaca Hias	1	-	1	
29	Palu Sidang	2	-	1	
30	Lambang Instansi	1	-	-	
31	Handycam	-	-	-	Dalam proses penghapusan

32	Audio Mixing Console	1	-	-	
33	Microphone/Wireless Mic	6	-	2	
34	UPS	7	-	2	
35	Microphone cable	11	-	-	
36	Camera Conference	1	-	-	
37	Genset	1	-	-	
38	Komputer jaringan lainnya	3	-	-	
39	PC	23	4	13	
40	Notebook	9	6	5	
41	Printer	4	6	16	
42	scanner	1	-	2	
43	server	1	-	1	
44	router	1	-	1	
45	Rak server	1	-	-	
46	Bangunan Gedung kantor permanen	1	-	-	
47	Rumah negara golongan I tipe B permanen	2	-	-	
48	Rumah negara golongan I tipe C permanen	4	-	-	
49	Pagar permanen	1	-	-	
50	Referensi	18	-	-	
51	Papan pengumuman	-	1	-	
52	Meja komputer	-	1	3	
53	Meja Resepsionis	-	1	1	
54	Compact disk player	-	1	-	
55	Alat tenis meja	-	1	1	
56	Lemari Penyimpan	-	-	3	
57	Mesin ketik manual standar	-	-	3	
58	Mesin Ketik manual Langewagon	-	-	2	
59	Rak kayu	-	-	1	
60	Filling Cabinet besi	-	-	12	
61	Tempat tidur besi	-	-	1	
62	Tempat tidur kayu	-	-	3	
63	Meja telepon	-	-	1	
64	Kasur/spring bed	-	-	7	
65	Meja makan kayu	-	-	1	

66	Pot bunga	-	-	6	
67	Jam elektronik	-	-	10	
68	Lemari es	-	-	2	
69	Kipas angin	-	-	18	
70	Equalizer	-	-	1	
71	Sound System	-	-	1	
72	Microphone table stand	-	-	6	
73	Stabilisator	-	-	3	
74	Lambang Garuda Indonesia	-	-	3	
75	Gambar Presiden/Wakil Presiden	-	-	1	
76	Pataka	-	-	5	
77	Gordyn/kray	-	-	9	
78	Kabel roll	-	-	9	
79	Asbak tinggi	-	-	3	
80	Keset kaki	-	-	6	
81	Kabel	-	-	2	
82	Camera digital	-	-	1	
83	Key telephone	-	-	5	
84	Pesawat telephone	-	-	12	
85	Telephone mobile	-	-	2	
86	Faximili	-	-	3	
87	Antenna SHF Transportable	-	-	2	
88	Peralatan antenna SHF	-	-	2	
89	All band receiver	-	-	1	
90	Alat pemadam kebakaran	-	-	1	
91	Generator	-	-	2	
92	Stabilizer	-	-	4	
93	Internet	-	-	1	
94	Hard disk	-	-	3	
95	Rambu papan tambahan	-	-	1	
96	Monografi	-	-	2	
97	Software computer	-	-	1	

1) Penetapan Status dan Penggunaan BMN

Mengacu pada PMK Nomor: 246/PMK.06/2014 tentang penetapan status BMN dan Perma Nomor: 1 Tahun 2017 tentang penetapan status BMN serta

berdasar usulan penetapan status BMN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: W4-TUN4/928/um.03.10/1x/2017 tanggal 04 Februari 2017 SK penetapan status BMN atas Tanah dan Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura belum ada.

2) Pengalihan Status dan Penghapusan BMN

Pengalihan status BMN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Usulan penghapusan BMN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah diselesaikan tuntutan ganti rugi (TGR).

d. Tata Persuratan

Mengacu pada ketentuan dalam Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Surat Masuk dan Surat Keluar kedinasan melalui satu pintu pengelolaan di bagian Umum dan Keuangan.

Tabel 24. Data Surat Masuk dan Surat Keluar Periode Mei Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	BAGIAN	JUMLAH	
		SURAT MASUK	SURAT KELUAR
1	Umum & Keuangan.	5	34
2	Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	19	35
3	Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.	3	3
4	Kepaniteraan Perkara.	15	42
5	Kepaniteraan Hukum.	3	3

1) Pengelolaan Perpustakaan

Tanggung jawab pengelolaan perpustakaan dibawah kendali Kasubbag Umum dan Keuangan dan sebagai petugas Kepustakaan (pustakawan) belum ditunjuk Penunjukan petugas perpustakaan belum dituangkan kedalam Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jumlah koleksi buku yang tersimpan di perpustakaan sampai dengan bulan Mei 2023 berjumlah 1200 (seribu dua ratus) buku. Pengelolaan database perpustakaan belum dilakukan ke dalam buku register pustaka. Pengelolaan database secara elektronik belum dilakukan melalui aplikasi **SLIM Senayan**, Sebagian buku telah dilakukan pengkodean atau labelisasi dan pemberian index pada buku koleksi.

2) Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Kepustakaan

Lemari Perpustakaan dua buah, dan meja satu buah.

3) Pengelolaan Aset dan BMN

2) Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berjumlah 25 Orang yang terdiri dari:

Tabel 25. Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Ketua	Jusak Sindar, S.H	
2.	Wakil Ketua	Merna Cinthia, S.H., M.H	
3.	Hakim	Yusuf Klemen, SH	
4.	Hakim	Donny Poja, S.H.	
5.	Hakim	Spyendik Bernadus Blegur, S.H	
6.	Hakim	Muhammad Adiguna Bimasakti, S.H	
7.	Panitera	Suyadi, S.H	
8.	Sekretaris	Fefi Yanti Thomas, SE	
9.	Panitera Muda Perkara	Ade Rudianto, A.Md	
10.	Panitera Muda Hukum	Jerika Wihelmina Risakotta, S.H., M.H	
11.	Panitera Pengganti	Petrus Mitting, S.H	
12.	Panitera Pengganti	David Alik Mitting, S.H	
13.	Panitera pengganti	Yontyk Putri Nandasari, S.H.	
14.	Panitera pengganti	Elizabeth Kaikatuy, S.H	
15.	Kasub Bag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Rafika, S.Pt	
16.	Juru Sita Pengganti	Komarudin, S.H	Plt. Kasub Bag Umum dan Keuangan
17.	Juru Sita Pengganti	Meice Tjandra, S.E.,S.H., M.H	
18.	Kasub. Bag Kepegawaian dan Ortala	Marta Dangkung	
19.	Staf Panitera Muda Hukum	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Jayapura
20.	Analisis SDM Aparatur	Apriani Samuel, S.Psi	Bendahara Pengeluaran
21.	Pengelola Keuangan Perkara	Yeyen. M. F. Suli, A.Md. Kom	
22.	Analisis Perkara Peradilan	Christina M. Y. Rohrohmana, S.H	
23.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	
24.	Pengadministrasi Registrasi Perkara	Dedy Widya Nugraha, A.Md	Pengelola BMN
25.	Analisis Perkara Peradilan	Lowrenszya Siagian, S.H	Staf Panmud Perkara

Sedangkan berdasarkan pada Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	JABATAN	NAMA	GOL
1	Ketua	Jusak Sindar, S.H	IV/b
2	Wakil Ketua	Merna Cinthia, S.H., M.H	IV/b
3	Hakim	Yusuf Klemen, SH	IV/b
4	Hakim	Donny Poja, S.H.	III/d
5	Hakim	Spyendik Bernadus Blegur, S.H	III/b
6	Hakim	Muhammad Adiguna Bimasakti, S.H	III/b
7	Panitera	Suyadi, S.H	IV/a
8	Sekretaris	Fefi Yanti Thomas, SE	IV/a
9	Panitera Muda Perkara	Ade Rudianto, A.Md	III/d
10	Panitera Muda Hukum	Jerika Wihelmina Risakotta, S.H., M.H	III/d
11	Panitera Pengganti	Petrus Mitting, S.H	III/d
12	Panitera Pengganti	David Alik Mitting, S.H	III/b
13	Panitera pengganti	Yontyk Putri Nandasari, S.H.	III/b
14	Panitera pengganti	Elizabeth Kaikatuy, S.H	III/b
15	Kasub Bag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Rafika, S.Pt	III/d
16	Juru Sita Pengganti	Komarudin, S.H	III/b
17	Juru Sita Pengganti	Meice Tjandra, S.E., S.H., S.H	III/c
18	Kasub. Bag Kepegawaian dan Ortala	Marta Dangkung	III/d
19	Staf Panitera Muda Hukum	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	IV/a
20	Analisis SDM Aparatur	Apriani Samuel, S.Psi	III/b
21	Analisis Perkara Peradilan	Christina M. Y. Rohrohmana, S.H	III/b
22	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	III/a
23	Analisis Perkara Peradilan	Lowrenszya Siagian, S.H	III/a
24	Pengelola Keuangan Perkara	Yeyen M. F. Suli., A.Md.Kom	II/d
25	Pengadministrasi Registrasi Perkara	Dedy Widya Nugraha, A.Md	II/c

1. Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi

Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi pada Pengadilan Tata usaha Negara Jayapura.

Tabel 27. Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi lainnya

NO	NAMA	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN ADMINISTRASI LAINNYA
1	Yontyk Putri Nandasari, S.H.	Panitera Pengganti.	Kasir
2	Christine M. Rohrohmana, S.H	Analisis Perkara Peradilan	Petugas Meja I
3	Komarudin, S.H	Juru Sita Pengganti	Plt. Kasub Umum dan Keuangan
4	Apriani Samuel, S.Psi	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur.	Bendahara
5	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama.	Operator SAIBA
6	Dedy Widya Nugraha, A.Md.	Pengadministrasian Registrasi Perkara.	Pembuat Daftar Gaji dan Operator BMN

Tabel 28. Tenaga Honorer yang Diperbantukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA		PENEMPATAN	TUGAS SESUAI SK
1.	Billy Langoy.	:	diperbantukan di bagian Umum dan Keuangan.	Pengemudi
2.	Syane Ratag, S.E.	:	diperbantukan di bagian Umum dan keuangan.	Pramubakti
3.	Esti Sitingjak, S.Kom.	:	diperbantukan di bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	Pramubakti
4.	Heni M. Klemen, S.H.	:	diperbantukan di bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	Pramubakti
5.	Rahmat, S.H.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Perkara.	Pramubakti
6.	Izak Pattipeilohy.	:	diperbantukan di bagian Umum dan keuangan.	Satpam
7.	Ridwan Kristiawan, S.H.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Perkara.	Pengemudi
8.	Jhon Lewakabessy, S.T.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Hukum.	Satpam
9.	Maikel P. kelyanin, S.T.	:	diperbantukan di bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan.	Pramubakti
10.	Hose Pondan Mangallo, S.E	:	diperbantukan di bagian Umum dan keuangan.	Pramubakti

2. Promosi, Mutasi dan Pensiun

Terdapat pejabat dan atau pegawai yang pada bulan Mei mendapat promosi/mutasi dan tidak terdapat pejabat atau pegawai yang pensiun.

Tabel 29. Data Promosi dan Mutasi Bulan Mei Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	NAMA	PROMOSI/MUTASI		TMT
		JABATAN LAMA	JABATAN BARU	
1.	Muhammad A. Bimasakti, S.H.	Hakim PTUN Jayapura	Hakim PTUN Mataram	-
2.	Spyendik B. Blegur, S.H	Hakim PTUN Jayapura	Hakim PTUN Kupang	-
3.	Ratna Jaya, S.H	Hakim PTUN Makassar	Hakim PTUN Jayapura	-

Terdapat pejabat dan atau pegawai yang pada bulan Mei mendapat promosi/mutasi dan tidak terdapat pejabat atau pegawai yang pensiun.

Tabel 30. Data Pensiun Bulan Mei Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	NAMA	PENSIUN		TMT
		JABATAN LAMA	JABATAN BARU	
1.	Marta Dangkung	Kasub Kepegawaian dan Ortala	Purna Tugas	1 Juni 2023

3. Diklat/Bimtek (SDM Teknik / Non Teknis)

Terdapat pejabat dan atau pegawai yang pada bulan Mei mengikuti Diklat maupun Bimtek.

Tabel 31. Diklat/Bimtek SDM Teknis dan Non Teknis Hakim dan Pegawai Bulan Mei Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT/BIMTEK	PELAKSANA
1.	Merna Cinthia, S.H., M.H	Hakim	Bimbingan Teknis Pendalaman dan Penajaman Pemeriksaan Sengketa Lingkungan Hidup	Ditjen Badilmiltun
2.	Jerika W. Risakotta, S.H., M.H	Panitera Muda Hukum	Bimbingan Teknis Kepaniteraan	PTTUN Makassar
3.	Yontyk P. Nandasari, S.H., M.H	Panitera Pengganti	Bimbingan Teknis Kepaniteraan	PTTUN Makassar
4.	Spyendik B. Blegur, S.H	Hakim	Bimbingan Teknis Akses Keadilan dan Perlindungan bagi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Peradilan	Ditjen Badilmiltun

4. Pengelolaan Database SAPK dan SIKEP

Database SAPK dikelola oleh MARTA DANGKUNG sebagai administrator pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Pemutakhiran database SAPK dilakukan setiap ada perubahan data pegawai terkait dengan kenaikan pangkat, promosi/mutasi/pensiun, serta perubahan data identitas pegawai. Pada aplikasi Sikep Mahkamah Agung, pengelolaan database dilakukan oleh Marta Dangkung sebagai user administrator satuan kerja. Hasil rekapitulasi kelengkapan database pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada aplikasi SIKEP adalah sebagai berikut:

Tabel 32. Rekapitulasi Kelengkapan Database Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	NAMA PEGAWAI	STATUS	KETERANGAN
1	Jusak Sindar, S.H	Lengkap	-
2	Merna Cinthia, S.H., M.H	Lengkap	-
3	Yusuf Klemen, SH	Lengkap	-
4	Donny Poja, S.H.	Lengkap	-
5	Spyendik Bernadus Blegur, S.H	Lengkap	-
6	Muhammad Adiguna Bimasakti, S.H.	Lengkap	-
7	Suyadi, S.H.	Lengkap	-
8	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	Lengkap	-
9	Ade Rudianto, A.Md	Lengkap	-
10	Jerika Wilhelmina. Risakotta, S.H., M.H	Lengkap	-
11	Fefi Yanti Thomas, SE	Lengkap	-
12	Petrus Mitting, SH	Lengkap	-
13	Marta Dangkung	Lengkap	-
14	Yontyk Putri Nandasari, SH	Lengkap	-
15	Elizabeth Kaikatuy, SH	Lengkap	-
16	Rafika, S.Pt	Lengkap	-
17	David Alik Mitting, SH	Lengkap	-
18	Komarudin, SH	Lengkap	-
19	Meice Tjandra, S.E.,S.H.,M.H	Lengkap	-
20	Christina M. Y. Rohrohmana, SH	Lengkap	-
21	Apriani Samuel, S.Psi	Lengkap	-
22	Yeyen M. F. Suli, A.Md.Kom	Lengkap	-
23	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	Lengkap	-
24	Dedy Widya Nugraha, A.Md	Lengkap	-
25	Lowrenszya Siagian, S.H	Lengkap	-

3) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

3.1. Revisi DIPA/POK

Pada bulan Mei Tahun 2023 tidak dilakukan revisi baik itu DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Kode Satker 539138 maupun DIPA 05 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Kode Satker 539139. Tetapi telah dilakukan penyusunan baseline anggaran tahun 2024.

3.2. Pengelolaan Website dan Jaringan

Pembuatan website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sudah mengacu pada ketentuan dalam surat Ketua Mahkamah Agung SK MA 1-144 tahun 2011 yang merupakan penyempurnaan dari SK 144/2007 mengenai dasar pembuatan situs Mahkamah Agung. Alamat website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dapat diakses di ptun-jayapura.go.id.

Pengelolaan website sudah sepenuhnya dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura termasuk akun Hosting sudah atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tanggung jawab pengelolaan ada pada Kasubag PTIP sesuai SK Nomor W4-TUN4/55/OT.01.3/1/2023 Pelaksana redaktur dan editor adalah Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom. Jaringan internet menggunakan vendor pihak ketiga yaitu Telkom Indonesia dengan kecepatan 310 Mbps dengan pengaturan 1 acces point 20 Mbps termasuk untuk kepentingan pelaksanaan SIPP sebesar 10 Mbps.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dengan luasnya wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura maka dituntut adanya pelayanan yang prima dan lebih baik terhadap masyarakat pencari keadilan. Untuk itu sangat diperlukan terpenuhinya sarana dan prasarana berupa pagar kantor yang belum diselesaikan serta Pelatihan sumber daya manusia ditingkatkan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman lebih baik kedepan.

B. Rekomendasi

Tertibnya Pelaksanaan Administrasi serta jalannya sistem peradilan yang baik hal ini tidak terlepas dari terpenuhinya kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya yaitu adanya tertib disiplin kerja sesuai instruksi Ketua Mahkamah Agung R.I.

Maka sehubungan hal tersebut diatas maka diusulkan sebagai berikut:

1. Diharapkan segera adanya pengisian Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan yang saat ini sedang kosong dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan ORTALA yang memasuki masa pensiun.
2. Diharapkan realisasi penambahan pegawai sebanyak 5 (lima) orang, mengingat tenaga staf pada masing-masing Sub Bagian sangat kurang bahkan tidak ada.
3. Diharapkan Pelatihan Aplikasi Perkantoran untuk Operator atau Admin.
4. Penambahan Anggaran DIPA tahun berikutnya pada layanan sarana internal (Belanja Modal), khususnya renovasi/pembangunan pagar yang dipandang perlu untuk segera direalisasikan mengingat tinggi pagar yang ada sekarang belum memadai untuk keamanan kantor dan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Jayapura, 09 Mei 2023

KETUA

JUSAK SINDAR, S.H
NIP. 19760401 200112 1 002

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.01

Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.05

Lampiran 3 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.01

Lampiran 4 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.05

Lampiran 6 : Laporan Perkara (LI – T1, LI – T2, LI – T3, LI – T4, LI – T5, LI – T6)

LAMPIRAN 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005.01

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BULAN MEI 2023**

SATKER/ KODE SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539138)
 PROPINSI : PAPUA (2500)
 BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG (005)
 UNIT ORGANISASI : BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)
 NO. DIPA/ TGL DIPA : SP DIPA- 005.01.2.539138/2023 TANGGAL 30 NOVEMBER 2022
 NO. DIPA/ TGL DIPA REVISI : SP DIPA- 005.01.2.539138/2023 REVISI KE -1 TANGGAL 14 APRIL 2023

(dalam rupiah)

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13
I	005.01.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN										
	1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi										
	1066.EBA	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL										
	1066.EBA.962	Layanan Umum										
	051	Dukungan Manajenemen Non Operasional Satker Daerah										
	A. 521252	Pengadaan Inventaris CPNS (Meja dan Kursi)	2,296,000	1,980,000	86.24%	0	0.00%	1,980,000	86.24%	316,000	13.76%	
	051	Dukungan Manajenemen Non Operasional Satker Daerah										
	B. 521252	Alat bantu jalan	1,000,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1,000,000	100.00%	
	JUMLAH KEGIATAN 1066.EAC.003		3,296,000	1,980,000	60.07%	0	0.00%	1,980,000	60.07%	1,316,000	39.93%	
	1066.EBA.994	LAYANAN PERKANTORAN										
	001	Gaji dan Tunjangan										
	A. 511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,246,455,000	416,504,200	33.42%	90,583,340	7.27%	507,087,540	40.68%	739,367,460	59.32%	
	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23,000	6,951	30.22%	1,706	7.42%	8,657	37.64%	14,343	62.36%	
	511121	Belanja Tunj. Suami/Isteri PNS	99,032,000	31,050,130	31.35%	6,136,210	6.20%	37,186,340	37.55%	61,845,660	62.45%	
	511122	Belanja Tnj. Anak PNS	30,375,000	9,702,242	31.94%	1,969,902	6.49%	11,672,144	38.43%	18,702,856	61.57%	
	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	32,760,000	11,700,000	35.71%	2,340,000	7.14%	14,040,000	42.86%	18,720,000	57.14%	
	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,675,850,000	497,875,000	29.71%	110,725,000	6.61%	608,600,000	36.32%	1,067,250,000	63.68%	
	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	258,378,000	81,568,752	31.57%	15,102,881	5.85%	96,671,633	37.41%	161,706,367	62.59%	
	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	73,579,000	23,536,500	31.99%	4,779,720	6.50%	28,316,220	38.48%	45,262,780	61.52%	
	511129	Belanja Uang Makan PNS	257,664,000	54,847,000	21.29%	9,199,000	3.57%	64,046,000	24.86%	193,618,000	75.14%	
	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	209,970,000	63,285,000	30.14%	17,350,000	8.26%	80,635,000	38.40%	129,335,000	61.60%	
	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	19,355,000	5,710,000	29.50%	1,105,000	5.71%	6,815,000	35.21%	12,540,000	64.79%	
	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	316,800,000	57,600,000	18.18%	14,400,000	4.55%	72,000,000	22.73%	244,800,000	77.27%	
	JUMLAH KEGIATAN 1066.EAA.001		4,220,241,000	1,253,385,775	29.70%	273,692,759	6.49%	1,527,078,534	36.18%	2,693,162,466	63.82%	
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor										
	A. 521111	Belanja Keperluan Perkantoran	584,360,000	208,522,500	35.68%	46,099,396	7.89%	254,621,896	43.57%	329,738,104	56.43%	
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	61,147,000	37,452,170	61.25%		0.00%	37,452,170	61.25%	23,694,830	38.75%	
	B. 521111	Belanja Keperluan Perkantoran (Video Fonference - Internet)	236,544,000	73,610,800	31.12%	13,688,410	5.79%	87,299,210	36.91%	149,244,790	63.09%	
	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	36,000,000	2,576,040	7.16%	2,853,540	7.93%	5,429,580	15.08%	30,570,420	84.92%	
	522112	Belanja Langganan Telepon	6,600,000	1,449,889	21.97%		0.00%	1,449,889	21.97%	5,150,111	78.03%	

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13
	522113	Belanja Langganan Air	3,600,000	221,000	6.14%		0.00%	221,000	6.14%	3,379,000	93.86%	
	522141	Belanja Sewa (Web Hosting)	7,000,000	0	0.00%		0.00%	0	0.00%	7,000,000	100.00%	
	C. 523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	498,636,000	699,000	0.14%		0.00%	699,000	0.14%	497,937,000	99.86%	
	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	56,020,000	55,960,257	99.89%		0.00%	55,960,257	99.89%	59,743	0.11%	
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	198,472,000	45,833,525	23.09%	25,651,445	12.92%	71,484,970	36.02%	126,987,030	63.98%	
	D. 521111	Belanja Keperluan Perkantoran (Pakaian Dinas)	34,152,000	0	0.00%	34,000,000	99.55%	34,000,000	99.55%	152,000	0.45%	
	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	80,604,000	20,151,000	25.00%		0.00%	20,151,000	25.00%	60,453,000	75.00%	
	H. 524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	109,080,000	44,072,899	40.40%	2,029,200	1.86%	46,102,099	42.26%	62,977,901	57.74%	
	JUMLAH KEGIATAN 1066.EAA.002		1,912,215,000	490,549,080	25.65%	124,321,991	6.50%	614,871,071	32.15%	1,297,343,929	67.85%	
	1071	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG										
	1071.EBB.951	LAYANAN SARANA INTERNAL										
	053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran										
	A. 532111	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin (Kursi Roda)	4,000,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	4,000,000	100.00%	
	1071.EBB.971	LAYANAN PRASARANA INTERNAL										
	051	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan										
	A. 533121	Pengadaan Prasarana Disabilitas (Jalur/Toilet Disabilitas)	34,433,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	34,433,000	100.00%	
	JUMLAH KEGIATAN 1071.EAD.001		38,433,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	38,433,000	100.00%	
	JUMLAH KESELURUHAN		6,174,185,000	1,745,914,855	28.28%	398,014,750	6.45%	2,143,929,605	34.72%	4,030,255,395	65.28%	

Jumlah Anggaran	6,174,185,000	Percentase
Realisasi Anggaran	2,143,929,605	34.72%
Sisa Anggaran	4,030,255,395	65.28%

Jayapura, 05 Juni 2023
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura


FEFI YANTI THOMAS, SE.
NIP. 19790310 200604 2 002

LAMPIRAN 2

LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005.05

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA BULAN MEI 2023

NO	KODE	JENIS BELANJA	PAGU DIPA	BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		SISA DANA		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9= (5+7)	10	11=(4-9)	12	13
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA												
I	005.01.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	6,174,185,000	1,745,914,855	28%	398,014,750	6.45%	2,143,929,605	35%	3,995,822,395	64.72%	
	1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi										
	1066.EBA.962	Layanan Umum	3,296,000	1,980,000	60%	0	0%	1,980,000	60%	1,316,000	39.93%	
	051	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah	3,296,000	1,980,000	60%	0	0%	1,980,000	60%	1,316,000	39.93%	
	1066.EBA.994	Layanan Perkantoran	6,132,456,000	1,743,934,855	28%	398,014,750	6%	2,141,949,605	35%	3,990,506,395	65.07%	
	001	Gaji Dan Tunjangan	4,220,241,000	1,253,385,775	30%	273,692,759	6%	1,527,078,534	36%	2,693,162,466	63.82%	
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,912,215,000	490,549,080	26%	124,321,991	7%	614,871,071	32%	1,297,343,929	67.85%	
	1071.EBB.951	Layanan Sarana Internal	38,433,000	0	0%	0	0.00%	0	0%	4,000,000	10.41%	
	053	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Kursi Roda)	4,000,000	0	0%	0	0%	0	0%	4,000,000	100.00%	
	051	Pengadaan Prasarana Disabilitas (Jalur/Toilet Disabilitas)	34,433,000	0	0%	0	0%	0	0%	34,433,000	100.00%	
II	005.05.BF	PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM	46,300,000	11,534,200	25%	4,000,000	8.64%	15,534,200	34%	30,765,800	66.45%	
	1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara										
	1059.AEA.003	Pelaksanaan Pengamanan Sidang	12,000,000	2,320,000	19%	1,600,000	13%	3,920,000	33%	8,080,000	67.33%	
	1059.QBA.001	Pos Bantuan Hukum	32,900,000	9,214,200	28%	2,400,000	7%	11,614,200	35%	21,285,800	64.70%	
	1059.QCA.001	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara	1,400,000	0	0%	0	0%	0	0%	1,400,000	100.00%	
JUMLAH KESELURUHAN			6,220,485,000	1,757,449,055	28%	402,014,750	6.46%	2,159,463,805	35%	4,026,588,195	64.73%	

Jumlah Anggaran	Rp 6,220,485,000	Percentase
Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA	Rp 2,159,463,805	34.72%
Sisa Anggaran	Rp 4,061,021,195	65.28%

Jayapura, 05 Juni 2023
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura



FEFI YANTI THOMAS, SE.
NIP. 19790310 200604 2 002

LAMPIRAN 3
LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 005.01

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Mei 2023

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (25.51) PAPUA / KOTA JAYAPURA
 Satuan Kerja : (539138) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
 Tgl, No. SP DIPA : 30 November 2022 , DIPA-005.01.2.539138/2023
 Tahun Anggaran : 2023
 KPPN : (063) Jayapura
 Alamat dan No Telp :

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A. BP Kas		0,00	0,00	0,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00
B. BP Selain Kas		0,00	0,00	0,00	0,00
	1. BP PNBP	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2. Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	0,00
3. Jumlah Kas	Rp	0,00 ^(*)

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp	0,00 ⁽⁻⁾
3. Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1. Saldo Awal	Rp	0,00
2. Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	0,00 ^(*)
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	0,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	0,00 ⁽⁻⁾
Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	0,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	2.443.704,00
3. Selisih	Rp	- 2.443.704,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) : Selisih sebesar Rp. 2.443.704,- merupakan penyetoran tanpa melalui bendahara penerimaan yang berupa setoran PNBP sewa rumah dinas sebesar Rp. 2.443.704,-.
2. Selisih Pembukuan (III.C) : Selisih sebesar Rp. 2.443.704,- merupakan penyetoran tanpa melalui bendahara penerimaan yang berupa setoran PNBP sewa rumah dinas sebesar Rp. 2.443.704,-.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



FEFI YANTI THOMAS, SE
NIP-197903102006042002

KOTA JAYAPURA , 31 Mei 2023

Bendahara Penerimaan



CHRISTINA MEGAWATI YULIANA ROHROHMANA SH
NIP 198508172019032006

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Mei 2023

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor.

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	0
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNPB	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	0
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	0
C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas yang dikuasai bendahara		
1. Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2. Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0
3. Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	0
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	0
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	2.443.704
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 2.443.704

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

Selisih sebesar Rp. 2.443.704,- merupakan penyetoran tanpa melalui bendahara penerimaan yang berupa setoran PNPB sewa rumah dinas sebesar Rp. 2.443.704,-.

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Selisih sebesar Rp. 2.443.704,- merupakan penyetoran tanpa melalui bendahara penerimaan yang berupa setoran PNPB sewa rumah dinas sebesar Rp. 2.443.704,-.

Bendahara Penerimaan



CHRISTINA MEGAWATI YULIANA ROHROHMANA SH

NIP 198508172019032006

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



FEFI YANTI THOMAS, SE

NIP 197903102006042002

LAMPIRAN 4

LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 005.05

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Mei 2023

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (25.51) PAPUA / KOTA JAYAPURA
 Satuan Kerja : (539139) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
 Tgl, No. SP DIPA : 30 November 2022 , DIPA-005.05.2.539139/2023
 Tahun Anggaran : 2023
 KPPN : (063) Jayapura
 Alamat dan No Telp :

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00026/SSBP/539139/2023

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	0,00	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00
B.	BP Selain Kas	0,00	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00
	1. BP PNB	0,00	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2. Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	0,00
3. Jumlah Kas	Rp	0,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp	0,00
3. Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1. Saldo Awal	Rp	0,00
2. Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	1.195.000,00
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	1.195.000,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	1.195.000,00
Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	1.195.000,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	1.195.000,00
3. Selisih	Rp	0,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) :

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



FEFI YANTI THOMAS, SE

NIP 197903102006042002

KOTA JAYAPURA , 31 Mei 2023

Bendahara Penerimaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Christina M Y Rohrohmana SH'.

CHRISTINA M Y ROHROHMANA SH

NIP 198508172019032006

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Mei 2023

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00026/SSBP/539139/2023

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	0
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNPB	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	0
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	0
C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas yang dikuasai bendahara		
1. Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2. Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0
3. Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	1.195.000
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	1.195.000
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	1.195.000
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	0

IV. Penjelasan atas selisih

- A. Selisih Kas (II.B)
- B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Bendahara Penerimaan



CHRISTINA M Y ROHROHMANA SH

NIP 198508172019032006

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



FEFI YANTI THOMAS, SE

NIP 197903102006042002

LAMPIRAN 5

LAPORAN PERKARA (LI- T1, LI – T2, LI- T3, LI- T4, LI- T5, LI – T6)



LAPORAN KEADAAN PERKARA
BULAN MEI TAHUN 2023

FORMULIR LI - T1

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL PENERIMAAN	DISMISSAL		ACARA SINGKAT						ACARA BIASA/ACARA CEPAT					SISA AKHIR		NOMOR PERKARA BELUM DIMINUTASI	KETERANGAN
			NAMA KETUA/PANITERA	TANGGAL		TANGGAL		MAJELIS HAKIM & PP	TANGGAL		TANGGAL	SUSUNAN MAJELIS HAKIM & PP	TANGGAL			BELUM DIBAGI	BELUM DIPUTUS		
				PANGGILAN	PENETAPAN	TERIMA PERLWLN	PENETAPAN MH DAN PP		DIMULAI SIDANG	PUTUSAN PERLWLN			PENETAPAN MH&HT&PP	PENRIKSN PERSIAPAN	DIMULAI SIDANG				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			KETUA : JUSAK SINDAR, SH WAKIL KETUA : MERNA CINTHIA, S.H., M.H HAKIM-HAKIM: 1. YUSUP KLEMEN, SH. 2. DONNY POJA, SH 3. SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, SH 4. MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, SH PANITERA / P. PENGGANTI: 1. S U Y A D I, SH. 2. ADE RUDANTO 3. JERIKA W. RISAKOTTA, SH., MH 4. PETRUS MITTING, SH. 5. DAVID ALIK MITTING,SH. 6. YONTYK PUTRI N.,SH 7. ELIZABETH KAIKATUY, SH REKAPITULASI 1. Sisa Bulan Lalu : 15 2. Masuk Bulan ini : 5 3. - Putus : 11 - Dismissal : - - Cabut : - 4. Sisa Bulan Ini : 9 5. Belum di bagi : - 6. Belum di Putus : 9 7. Dalam Minutasi : -
1	25/G/2022/PTUN JPR	07-10-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	07-10-2022	C1,C3,C9/D7	17-10-2022	22-11-2022	04-05-2023	-	-		A
2	28/G/2022/PTUN JPR	15-11-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	16-11-2022	C1,C3,C9/D6	24-11-2022	11-01-2023	31-05-2023	-	-		B
3	31/G/2022/PTUN JPR	28-11-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	28-11-2022	C9,C4,C9/D	07-12-2022	19-01-2023	31-05-2023	-	-		C1
4	33/G/2022/PTUN JPR	06-12-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	06-12-2022	A,C3,C4/D1	15-12-2022	8-02-2023	31-05-2023	-	-		C3
5	34/G/2022/PTUN JPR	12-12-2022									13-12-2022	C3,C4,C9/D6	29-12-2022	2-02-2023	31-05-2023	-	-		C4
6	35/G/2022/PTUN JPR	15-12-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	15-12-2022	A,C3,C4/D7	11-01-2023	25-01-2023	-	-	35/G/2023		C9
7	1/G/2023/PTUN JPR	12-01-2023									13-01-2023	C1,C4,C9/D3	24-01-2023	13-02-2023	24-05-2023	-	-		
8	2/G/2023/PTUN JPR	12-01-2023	-	-	-	-	-	-	-	-	13-01-2023	C1,C4,C9/D2	24-01-2023	13-02-2023	24-05-2023	-	-		D
9	3/G/2023/PTUN JPR	16-01-2023	-	-	-	-	-	-	-	-	16-01-2023	A,C3,C4/D5	30-01-2023	8-02-2023	30-05-2023	-	-		D1
10	5/G/2023/PTUN JPR	08-03-2023	-	-	-	-	-	-	-	-	09-03-2023	C3,C9,C4/D1	18-03-2023	13-04-2023	-	-	5/G/2023		D2
11	6/G/LH/2023/PTUN JPR	13-03-2023	-	-	-	-	-	-	-	-	13-03-2023	B,C1,C9/D	28-03-2023	10-05-2023	-	-	6/G/LH/2023		D3
12	7/G/2023/PTUN JPR	16-03-2023	-	-	-	-	-	-	-	-	16-03-2023	B,C9,C4/D3	29-03-2023	09-05-2023	-	-	7/G/2023		D4
13	8/G/2023/PTUN JPR	27-03-2023	-	-	-	-	-	-	-	-	27-03-2023	B,C1,C3/D7	04-04-2023	15-05-2023	15-05-2023	-	-		D5
14	9/G/2023/PTUN JPR	30-03-2023	-	-	-	-	-	-	-	-	30-03-2023	C1,C3,C9/D9	13-04-2023	24-05-2023	24-05-2023	-	-		D6
15	10/G/2023/PTUN JPR	17-04-2023	-	-	-	-	-	-	-	-	17-04-2023	C3,C9,C4/D2	27-04-2023	17-05-2023	17-05-2023	-	-		D7
16	11/G/2023/PTUN JPR	02-05-2023	-	-	-	-	-	-	-	-	02-05-2023	C1,C4,C9/D5	10-05-2023	24-05-2023	-	-	11/G/2023		
17	12/G/2023/PTUN JPR	08-05-2023	-	-	-	-	-	-	-	-	08-05-2023	C3,C9,C4/D1	15-05-2023	-	-	-	12/G/2023		
18	13/G/2023/PTUN JPR	08-05-2023	-	-	-	-	-	-	-	-	09-05-2023	C1,C3,C4/D2	18-05-2023	-	-	-	13/G/2023		
19	14/G/2023/PTUN JPR	17-05-2023	-	-	-	-	-	-	-	-	17-05-2023	A,C1,C3/D5	30-05-2023	-	-	-	14/G/2023		
20	15/G/2023/PTUN JPR	22-05-2023	-	-	-	-	-	-	-	-	22-05-2023	B,C1,C3/D3	30-05-2023	-	-	-	15/G/2023		

Mengetahui:

KETUA

JUSAK SINDAR, SH
NIP. 197604012001121002

Jayapura, 31 Mei 2023

PANITERA,

SUYADI, SH
NIP. 197205151994031002



LAPORAN JENIS PERKARA
BULAN MEI TAHUN 2023

Formulir LI - T2

NO	JENIS PERKARA	SISA BULAN LALU	PERKARA			PENGGUGAT		TERGUGAT		DISMISSAL	PERLAWANAN		PUTUSAN						SISA PERKARA BULAN INI	Permohonan				Terima Berkas			KET.
			MASUK	DICABUT	JUMLAH	PERORANGAN	BADAN HUKUM	PUSAT	DAERAH		DITOLAK	DIKABULKAN	GUGUR	DICABUT	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIKABULKAN	JUMLAH		BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI	EKSEKUSI	BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
A	GUGATAN																										
1	Pertanahan	6	1	-	7	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-	2	2	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Kepegawaian	6	4	-	10	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-	3	2	5	5	2	-	-	-	-	-	-	-
3	Perijinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Lingkungan Hidup	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Badan Hukum/Parpol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kepala Desa dan Perangkat desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pergantian Antar Waktu (PAW)	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Sengketa Informasi Publik/KIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Fiktif Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	KIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Tindakan Faktual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Merek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Lain - Lain	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
JUMLAH		15	5	-	20	20	-	-	20	-	-	-	-	-	-	7	4	11	9	3	-	1	-	-	-	-	-

Jayapura, 31 Mei 2023

Mengetahui :
JUSAK SINDAR, SH
NIP. 197604012001121002

PANITERA,
SUYADI, SH
NIP. 197205151994031002



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
JALAN RAYA SENTANI WAENA-KEL WAENA, DISTRIK HERAM
KOTA JAYAPURA Telp : (0967) 574160
Email : Kepaniteraan@ptun-jayapura.go.id , Website : www.ptun.jayapura.go.id

LAPORAN PELAKSANAAN PRODEO
BULAN MEI TAHUN 2023

Formulir LI - T3

No.	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	TANGGAL PUTUSAN	BIAYA PERKARA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		N I H I L			

Mengetahui :

KETUA

JUSAK SINDAR, SH
NIP. 197604012001121002

Jayapura, 31 Mei 2023

PANITERA,

SUYADI, SH
NIP. 197205151994031002



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
JALAN RAYA SENTANI WAENA-KEL WAENA, DISTRIK HERAM
KOTA JAYAPURA Telp : (0967) 574160
Email : Kepaniteraan@ptun-jayapura.go.id , Website : www.ptun.jayapura.go.id

LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM
BULAN MEI 2023

Formulir LI - T4

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL	NAMA PENERIMA JASA	NAMA ORGANISASI PEMBERI JASA	KEDUDUKAN PEMOHON BANTUAN	JENIS JASA BANTUAN	KETERANGAN
1	-	01-05-2023	Martha Wanggai	ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, LEMBAGA BANTUAN HUKUM PAPUA JUSTICE & PEACE, YULIYANTO,SH.,MH. 0811488998, Jl. Jeruk Nipis Depan RS-POLRI Bhayangkara, Jayapura-Papua	Pemohon	Konsultasi masalah pengurusan gaji pensiun dari Alm. Suami yang mempunyai 2 orang diluar nikah dar Taspen meminta surat pengesahan anak dari Pengadilan	
2	-	03-05-2023	Hosga Genogga		Pemohon	Konsultasi Anggota DPKP papua terkait permasalahan pembatalan 7 Kampung di Kab. Tolikara, beliau hanya ingin mengklarifikasi terkait Putusan Pengadilan	
3	-	12-05-2023	Archilaus A. Fonataba		Pemohon	Konsultasi Hukum terkait ingin menggugat Komisi Indonesia	
4	-	15-05-2023	Muhamad Nasir		Pemohon	Konsultasi Hukum terkait Surat Keterangan Cerai	
5	-	15-05-2023	Jayadin Anif		Pemohon	Konsultasi Hukum terkait pencabutan sertifikat	
6	-	22-05-2023	Femmy Masihor		Pemohon	Konsultasi Masalah tanah di BTN Gren Doyo Baru dari Tahun 2008 sampai sekarang tidak ada penyelesaian	
7	-	24-05-2023	Stelia N. Ulus		Pemohon	Konsultasi Hukum masalah asusila yang dilakukan oleh anaknya dan minta pendampingan di Polres	

Mengetahui :

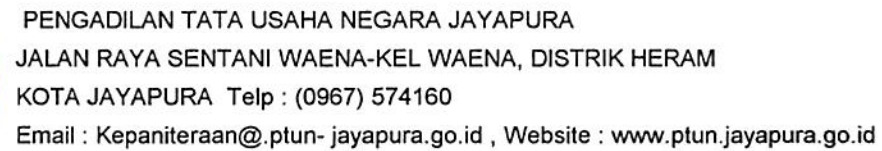
KETUA,

JUSAK SINDAH, SH
NIP. 197604012001121002

Jayapura, 31 Mei 2023

PANITERA,

SUYADI, SH
NIP. 197205151994031002



Formulir L1-T5

No.	NAMA PENGADU	HAL YANG DIADUKAN	TANGGAL PENGADUAN	TINDAK LANJUT PENGADUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		N I H I L			

Mengetahui :

KETUA,

JUSAK SINDAR, SH.

NIP. 197604012001121002

PANITERA,

SUYADI, SH

NIP. 197205151994031002



LAPORAN KEUANGAN PERKARA
(PENGADILAN TINGKAT PERTAMA)
BULAN MEI TAHUN 2023

Biaya Perkara/Panjar Biaya Perkara		Form :LI-T6			
No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	40,958,500	-	-	40,958,500
2	Penerimaan	-	10,778,000	-	10,778,000
3	Alat Tulis Kantor	-	-	750,000	750,000
4	Biaya Panggilan	-	-	553,000	553,000
5	Biaya Pemberitahuan	-	-	347,000	347,000
6	Biaya Pemeriksaan Setempat	-	-	2,250,000	2,250,000
7	Biaya Pemberkasan Dan Pengiriman Berkas	-	-	1,403,000	1,403,000
7	Biaya Pengiriman Perkara	-	-	500,000	500,000
8	Materai	-	-	120,000	120,000
9	PNBP:	-	-	-	-
	a. Biaya Pendaftaran	-	-	550,000	550,000
	b. Redaksi	-	-	120,000	120,000
	c. PNBP Lain-lain	-	-	705,000	705,000
10	Pengembalian Sisa Panjar kepada Pihak	-	-	3,067,000	3,067,000
11	Pengembalian Sisa Panjar kepada Negara	-	-	-	-
Jumlah		40,958,500	10,778,000	10,365,000	41,371,500

Biaya Proses/ATK/Pemberkasan					
No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	11,921,500	-	-	11,921,500
2	Penerimaan	-	750,000	-	750,000
3	Pengeluaran (untuk seluruh pembelian ATK secara riil, tidak perlu dirinci satu persatu)	-	-	215,000	215,000
Jumlah		11,921,500	750,000	215,000	12,456,500

Biaya Eksekusi					
No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	1,682,000	-	-	1,682,000
2	Penerimaan	-	500,000	-	500,000
3	Materai	-	-	-	-
4	Biaya Surat Panggilan	-	-	-	-
5	Biaya Surat Pemberitahuan	-	-	-	-
5	Hak-hak Kepaniteraan	-	-	25,000	-
6	Surat Pemberitahuan Kepada Presiden/DPR	-	-	-	-
7	Pengumuman Media Cetak	-	-	-	-
8	Lain-lain	-	-	-	-
Jumlah		1,682,000	500,000	25,000	2,157,000

Jayapura, 31 Mei 2023

MENGETAHUI :
KETUA,

JUSAK SINDAR, SH
NIP. 197604012001121002

PANITERA,

SUYADI, SH
NIP. 197205151994031002